



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
RDPU KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat 2. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2024
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: Menerima Apirasi terkait Permasalahan Pendidikan
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 55 orang Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat: 1. Budi Sisko Purnomo, S.P.,Gr. (Ketua Forum Guru P1 Jawa Barat) 2. Rusli Hamzah, S.Pd.I., Gr. (Koordinator KCD XI) 3. Samian, S.Pd.I.,Gr. (Koordinator KCD X) 4. Hafid Fahrudin, S.Pd.,Gr. (Koordinator KCD VIII) 5. Lena Royana, S.Pd. (Wakil Koordinator KCD XII) 6. Galan Heryanto, S.Pd. (Wakil Koordinator KCD XIII) 7. Aditya Karisma, S.Pd. (Koordinator KCD VI) 8. Kusriani, S.Pd. (Koordinator KCD III) 9. Yuda Yudianto, S.Pd., Gr. (Koordinator KCD VII) 10. Urwatul Wutsqo, SE., M.Pd. (Koordinator KCD I)  Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah: 1. Diana Udhi H, S.Pd, M.Pd (Ketua FGPPNS Jawa Tengah) 2. Adi Kurnianto (Anggota Cabdin XII) 3. Jamjuri (Bendahara FGPPNS Jawa Tengah) 4. Wahono (Penasehat FGGPNS Jawa Tengah)

5. Heri Feriyanto (Anggota Cabdin IX)

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.45 WIB oleh Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. CATATAN/KESIMPULAN**

A. Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, saran, aspirasi mengenai guru (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat meminta kepada Komisi X DPR RI untuk mendorong regulasi pemerintah pusat (K/L terkait) agar regulasi seleksi ASN P3K Tahun 2024 dapat sesuai harapan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Mendorong regulasi dari Pemerintah Pusat (K/L terkait) untuk memprioritaskan penuntasan guru prioritas pertama (P1) dalam seleksi ASN PPPK pada jabatan fungsional guru pada instansi daerah Tahun 2024.
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan Guru P1 Jawa Barat tanpa sisa sebanyak 1.529 kepada Pemerintah Pusat (KEMENPAN-RB) dalam pengajuan formasi di Tahun 2024.
  - c. Mendorong Guru P1 yang telah dinyatakan lulus agar segera ada kejelasan penempatan sesuai domisili (dapodik), SK PPPK tanpa tes kembali, cukup daftar ulang data di akun SSC ASN untuk mendapatkan NIP PPPK.
2. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah menyampaikan catatan, tuntutan aspirasi dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
  - a. Mendorong ada regulasi dan juknis Pemerintah untuk kejelasan status dan penempatan sesuai domisili (dapodik) P1 khususnya bagi Guru honorer swasta (Yayasan).
  - b. Mendorong dibuka seluruh formasi mata pelajaran dan menuntaskan P1 sebanyak 4042 untuk Jawa Tengah pada tahun 2024.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan aspirasi yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI, KEMENPAN-RB RI, BKN, dan Kemendagri RI untuk melakukan moratorium pengangkatan formasi baru agar bisa menuntaskan pengangkatan P1 di tahun 2024.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI, KEMENPAN-RB RI, BKN, dan Kemendagri RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan penyelesaian pengangkatan P1 di daerahnya masing-masing di Tahun 2024.
3. Komisi X DPR RI tetap berkomitmen untuk memastikan komitmen Pemerintah dengan melakukan pengiriman surat kepada Kemendikbudristek RI terkait rekrutmen sejuta guru agar diselesaikan sebelum peralihan pemerintahan baru.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.20 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol.**